**KEPENTINGAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENJALIN
KERJASAMA SISTER CITY DENGAN PROVINSI BA RIA-VUNG TAU
(VIETNAM)**

Oleh : M. Fariz Akbar Fadillah
Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzed the interests of the Padang City Government in establishing a Sister City Cooperation with Ba Ria-Vung Tau Province (Vietnam). The Padang City Government had carried out cooperation since the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) in 2016. This cooperation involved sub-state actors in international relations activities, which was included in the paradiplomacy phenomenon as an effort to fulfill regional interests in advancing regional capabilities or potentials in accordance with the mandate of regional autonomy policies. The Padang City Government and Ba Ria-Vung Tau Province had their respective regional government interests in implementing cooperation to achieve their common interests.

This research employed a qualitative method, namely through interviews and library studies, as well as secondary data materials. The research utilized the perspective of liberalism and paradiplomacy theory, where paradiplomacy refers to the ability of sub-state actors to become actors in international relations.

The findings of this research indicated that the interests of the Padang City Government in establishing a Sister City Cooperation with Ba Ria-Vung Tau Province were to maximize the capabilities of its region, boost the economy that had declined in 2013, and resolve various issues in the agreed-upon cooperation fields. By utilizing this research as a policymaking consideration, the Padang City Government and other local governments seeking to engage in international cooperation as sub-state actors could take appropriate steps.

Keywords: Interests, Sister city, Paradiplomacy, Padang City, Ba Ria-Vung Tau Province

PENDAHULUAN

Kerja sama internasional banyak dilakukan oleh beberapa aktor yang tidak hanya saja terjadi antara negara-negara melainkan negara-kelompok, dan kelompok-kelompok yang bahkan pelakunya bisa sebuah organisasi. Dewasa ini kerja sama internasional muncul dengan aktor sebuah entitas *sub-state* seperti provinsi atau kota lintas negara dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Karena adanya kepentingan nasional yang secara rinci guna memenuhi kebutuhan tiap sub-negara yang tidak sama dan tidak dapat terpenuhi oleh negara itu sendiri, sehingga dengan landasan pikiran seperti itulah yang membuat sub-negara tersebut melakukan kerja sama yang bersifat transnasional.¹

Interaksi internasional yang terjadi pada pemerintah daerah di penjuru dunia ini memunculkannya sebutan *Sister City* atau kota kembar dalam bahasa Indonesianya, dimana aktor bisa menjadi provinsi maupun kota. Setiap organisasi *sister city* ini bersifat independen yang berarti mereka mencari kegiatan dan juga area tematik yang penting bagi mereka.² Terkait pemerintah daerah memiliki peluang menjadi pelaku hubungan luar negeri ini dilandaskan oleh peraturan pemerintah luar negeri pada UU No. 37 Tahun 1999 yang berisi tentang hubungan luar negeri dan UU No.24

Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.³

Pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negeri setelah ditetapkannya UU No.22 tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah dimana lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, pada isian UU ini juga meletakkan otonomi daerah dimana semua urusan pemerintah adalah urusan pemerintah daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri.⁴ sehingga kerja sama *sister city* ini memiliki makna yang strategis sebab bertemunya pusat pertumbuhan dan perkembangan kota dalam suatu kerja sama yang memiliki keuntungan mutualisme.

Pengonsepan kerja sama *sister city* dengan cara menawari dua jalan (menerima dan memberi) segala hal yang didapat dari kedua belah pihak ini menunjukkan bahwasanya program ini mengarah kepada suatu hal yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi peluang besar bagi otonomi daerah untuk memajukan pembangunan daerahnya. Satu di antara bentuk kerja sama kota kembar di Indonesia adalah hubungan baik Kota Padang di Sumatera Barat dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau di Vietnam yang terhitung sejak 2016.

Kota Padang sendiri merupakan kota terbesar di Sumatera Barat yang terletak di

---

¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: 2013).

² Sister cities International, *what is a sister cities*, diakses di <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/> pada tanggal 6 Juli 2024.

---

³ Departemen Luar Negeri Indonesia, *Buku Panduan Hukum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (2006). Hal. 10

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah*, (1999)

pantai barat Pulau Sumatera, ibu kota Sumatera Barat ini membujur dari Utara ke Selatan ini memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486,209 Km². Kota ini juga merupakan pusat perekonomian di Sumatera Barat dengan pendapatan perkapita yang tinggi, menjadi kota sebagai pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah.⁵

Sedangkan Ba Ria-Vung Tau sendiri merupakan sebuah Provinsi yang berada di tepi pantai bagian Selatan Vietnam yang memiliki luas wilayah 1.982 km² yang berbatasan dengan kota Ho Chi Minh di sebelah barat, berbatasan juga dengan provinsi Dong Nai di sebelah Utara, berbatasan dengan provinsi Binh Thuan di sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Timur di sebelah Selatan, dengan garis pantai sepanjang 305 km. Memiliki masyarakat yang berkehidupan berbudaya yang kaya akan adat istiadat juga serta kepercayaan yang beragam juga, bahkan mempunyai unsur budaya yang khas yakni budaya laut. Memiliki SDA yang kaya dan keunggulan yang beragam menjadi potensi perkembangan ekonomi yang cepat, seperti minyak dan gas, pelabuhan dan transportasi laut, produksi dan pengolahan hasil laut yang unggul, dan khususnya pariwisata.⁶

---

⁵ Padang.go.id, *Gambaran Umum Kota Padang*, diakses di <https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang> pada tanggal 06 Juli 2024.

⁶ ITPA, *Ba Ria-Vung Tau verview*, diakses di <https://en-ittpa.baria-vungtau.gov.vn/article?item=3580f48cbf59>

KERANGKA TEORI

Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi mengarah pada perilaku dan kapasitas guna menjalankan hubungan lintas negara dengan pihak asing yang dilakukan oleh bagian dari sub-negara berskala regional seperti pemerintah provinsi atau kota untuk mencapai keperluan dan kepentingan masing-masing secara spesifik. Kerja sama lintas negara yang dilakukan oleh daerah otonom kalau dipandang dari perspektif studi hubungan internasional, secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi berpusat pada pemerintahan nasional melainkan aktor-aktor non-pemerintah pusat dapat menjalankan hubungan secara luas tanpa melibatkan pemerintah nasional tersebut.⁷

Pemerintah daerah dapat menjadi aktor hubungan internasional pada fenomena paradiplomasi sebelumnya perlu menjalankan tata cara umum sebelum menjadi aktor dalam hubungan internasional. hubungan kerja sama luar negeri yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, wajib dikoordinasikan dan dikonsultasikan bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kemudian Sebagai koordinator hubungan dan kerjasama internasional, Kemlu akan memberikan nasihat politik dan hukum serta pertimbangan atas inisiatif kerjasama yang dilakukan

---

[3a87f386598f7c662ec6](https://doi.org/10.30605/jomfisip.v11i2.3a87f386598f7c662ec6) pada tanggal 06 Juli 2024.

⁷ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: 2013).

oleh pemerintah daerah dengan organisasi asing.

Pada praktiknya, paradiplomasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni politik paradiplomasi, ekonomi paradiplomasi, dan *multi-purpose* paradiplomasi. Politik paradiplomasi sendiri berbentuk hubungan pemerintah daerah dengan aktor HI lainnya, sedangkan ekonomi paradiplomasi adalah kerja sama sub-negara dengan tujuan guna mencapai kemakmuran ekonomi tiap aktornya, dan *multi-purpose* paradiplomasi sendiri hubungan kerja sama yang mempunyai beragam tujuan dimana mengakomodir tidak hanya satu kepentingan dalam satu kesepakatan, contohnya kepentingan ekonomi, budaya, pertanian, pendidikan, perikanan, dan pariwisata.⁸

Tingkat Analisa Negara Bangsa

Dalam penelitian ini penulis mengambil Tingkat Analisa Negara-Bangsa, sesuai dengan penjelasan dari Patrick Morgan bahwa dalam hubungan internasional ada 5 tingkat analisa yang berguna untuk alat memahami perilaku dan tindakan dari aktor hubungan internasional. Lima tingkat yang dimaksud adalah: (1) tingkat analisis individu, dimana pandangan yang dipakai dalam melihat kejadian pada hubungan internasional sebagai interaksi antar individu, (2) tingkat analisis kelompok individu, dimana berasumsi bahwa individu

---

⁸ T. A. Mukti, L. M. Fathun, A. Muhammad, S. I. Sinambela, & S Riyanto. *Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea* (Jurnal Hubungan Internasional, 2021, Vol.9 no.2).

melakukan tindakan internasional dalam suatu kelompok, (3) tingkat analisis negara-bangsa, pada tingkat ini perilaku negara dalam interaksi dengan negara lain merupakan penentu, (4) tingkat analisis kelompok negara-bangsa, yang menganggap bahwa hubungan internasional adalah interaksi yang dibentuk oleh kelompok negara, (5) tingkat analisis sistem internasional, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku dan interaksi antar aktor.⁹

Penulis mengambil tingkat analisis negara-bangsa yang menganggap bahwa hubungan kerja sama internasional Kota Padang dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau adalah interaksi yang dibentuk oleh sub-negara sebagai perwakilan negara dalam menjalin hubungan baik selaku aktor internasional.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui wawancara dan studi kepustakaan serta data bahan sekunder. Kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu analisis masalah. Di lain sisi landasan teori juga dipakai sebagai latar belakang dan memilah fokus penelitian dari perspektif mana masalah ini akan dipandang. Metode penelitian ini juga

---

⁹ Patrick Morgan, *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?* New Brunswick Transaction, (1982), (dikutip di Mohtar Mas'oe'd. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 40-42)

diselaraskan dengan cara deskriptif terkait masalah dan gambaran yang sesuai dengan permasalahan di lapangan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjalin kerja sama yang bersifat lintas negara dengan provinsi Ba Ria-Vung Tau, kota Padang sudah pernah terlebih dahulu bekerja sama dengan kota Hildesheim di Jerman (1988 - 2006). Kerja sama dengan kota Hildesheim ini namun sayangnya dihentikan pada tahun 2006, dengan beberapa pertimbangan dan faktor seperti kurangnya komitmen dan koordinasi yang mulai menurun seiringnya waktu dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerja sama.

Meskipun hubungan *sister city* antara Padang dan Hildesheim sudah tidak aktif lagi, kota Padang berharap kemitraan *sister city* di masa depan dapat mengambil manfaat dari pengalaman ini. Untuk memastikan bahwa kolaborasi *sister city* berjalan dengan lancar dan efektif, sangat penting untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan komunikasi para pemangku kepentingan. Pasca kerja sama dengan Hildesheim selain keinginan pemerintah kota Padang untuk kembali ingin bekerja sama dengan kota lain di negara yang berbeda, ada juga beberapa faktor pendorong yang akhirnya membuat pemerintah kota Padang mengirim surat kepada pemerintah provinsi Ba

Ria-Vung Tau untuk menjajaki kerja sama *sister city*.

Faktor Pendorong Pemerintah Padang di Bidang Perekonomian

Kepentingan pemerintah kota Padang dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau di Bidang Perekonomian dikarenakan kondisi perekonomian kota Padang pada tahun 2013 turun dan relatif rendah dibandingkan tahun 2012.¹¹ Kemudian didukung dengan rekomendasi oleh Dubes RI untuk Vietnam yang menyarankan menjalin kerja sama dengan salah satu kota di Vietnam dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang pesat pada saat itu.

Pemerintah Kota Padang berharap dapat meningkatkan perekonomian melalui kerja sama ini. Kolaborasi ini dapat meningkatkan SDM melalui pelatihan dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong keterlibatan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintah Padang berharap dapat memperkuat hubungan di dalam masyarakat dan antara pemerintah dan konstituennya. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan potensi ekonomi dan prospek komersial yang tersedia, kerjasama kota kembar dapat membantu proses ini.¹²

---

¹⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

---

¹¹ BPS Kota Padang, *Statistik Daerah Kota Padang 2013*, (BPS Kota Padang, No. 11020001.1371) Hal. 44

¹² Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Padang, *Catatan KSSC Padang BRVT*, 2019, hal. 7

Maka dari itu *Output* kerja sama *sister city* antara Padang dan Ba Ria-Vung Tau di bidang perekonomian berupa program kerja sama pertukaran alternatif delegasi pemerintah dan misi bisnis guna mendorong peluang investasi dan perdagangan di berbagai sektor.

Faktor Pendorong Pemerintah Padang di Bidang Perikanan

Dengan karakteristik daerah yang sama akan budaya dan tradisi serta kearifan lokal maritimnya, juga memberikan peluang cocoknya kerja sama yang akan dibangun. Kota Padang masih banyak memiliki masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sebab ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini kaya akan keindahan alamnya yang berupa laut dan pantai lepas yang indah, begitu juga Provinsi Ba Ria-Vung Tau yang terletak di pesisir pantai dan mayoritas penduduk yang masih bekerja sebagai nelayan. Provinsi yang terletak di pinggir laut negara Vietnam ini juga menjadi suatu provinsi yang mempunyai teknologi pengolahan perikanan yang bagus serta menjadi pusat pelabuhan negara Vietnam yang sebagai tempat transit perdagangan lintas negara juga.

Pemerintah kota Padang bertujuan melakukan kerja sama dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau di bidang perikanan agar dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan, mengingat kota Padang dan Provinsi Ba Ria-Vung Tau sama-sama unggul dalam SDA lautnya. Namun pengelolaan dan produksi perikanan di kota Padang sendiri tidak lebih maju dibandingkan provinsi Ba Ria-vung Tau, padahal di kota Padang sendiri

mempunyai sumber laut yang kaya akan berbagai jenis perikanan. Kemudian pemerintah kota Padang berharap dapat belajar dan juga bertukar informasi serta teknologi dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau pada pengelolaan perikanan.¹³

Faktor Pendorong Pemerintah Padang di Bidang Pertanian

Dalam kerja sama *sister city* dengan Provinsi Ba Ria-vung Tau pada bidang atau sektor pertanian, pemerintah kota Padang mempunyai kepentingan dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM petani dan penyuluh pertanian, kemudian meningkatkan inovasi dan kreativitas petani dan penyuluh pertanian, berharap dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman serta transfer teknologi di bidang pertanian, kemudian juga meningkatkan peran penyuluh pertanian sehingga lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian, juga mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja sama antara pemerintah kota Padang dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau dalam pembangunan pertanian.¹⁴

Mengingat dan mempertimbangkan dengan alasan bahwa negara Vietnam terutama Provinsi Ba Ria-Vung Tau memiliki banyak peluang untuk ekspansi di sektor pertanian, provinsi ini juga sangat dikenal sebagai daerah penghasil padi, ubi-ubian, dan

¹³ M. Fariz Akbar Fadillah, *Hasil wawancara Penulis dengan Pemerintah Kota Padang*.

¹⁴ Dinas Pertanian Kota Padang, *Magang Petani, PPL, dan Petugas/ Pendamping*, Laporan Magang, 2018. hal. 2

bahkan banyak dikenal sebagai penghasil buah-buahan khas seperti kelengkeng, manggis, buah naga, dll. Produksi padi sendiri di provinsi Ba Ria-Vung Tau pada periode 2010-2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata produksi tahunan sebanyak 300.000 ton. er-tahun 2013 sektor pertanian Ba Ria-Vung Tau juga mempunyai nilai ekspor yang meningkat pesat dari 50 juta USD pada tahun menjadi 75 juta USD dengan pasar ekspor produk pertaniannya adalah negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.¹⁵

Faktor Pendorong Pemerintah Padang di Bidang Pariwisata dan Budaya

Melihat kesamaan potensi wisata dikarenakan sama-sama mempunyai wisata alam yang indah seperti pantai, pulau, dan juga kekayaan budaya dan tradisi yang banyak dikunjungi wisatawan domestik masing-masing kota, baik itu pemerintahan kota padang maupun provinsi Ba Ria-Vung Tau sepakat bekerja sama di bidang pariwisata. Dengan memiliki lokasi yang strategis seperti sama-sama terletak di jalur pantai yang merupakan tujuan wisata paling banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional.

Kepentingan pemerintah kota Padang dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau di Bidang Pariwisata dan Budaya dikarenakan kondisi sektor pariwisata kota perlunya perluasan dan promosi lebih lanjut

agar ada peningkatan dan kemajuan, mengingat karakteristik daerah yang sama-sama merupakan kota yang berada di tepi laut, kota Padang dan Ba Ria-Vung Tau mempunyai kesamaan keunggulan dalam bidang pariwisata dan budayanya. Sehingga terjalannya kerja sama ini dan menghasilkan program berupa „Pojok Padang“ dan „Ba Ria-Vung Tau Corner“ sebagai wadah guna mempromosikan dan menginformasikan budaya dan pariwisata antar daerah, kemudian juga membuka jalur wisata Ba Ria-Vung Tau ke Padang.¹⁶

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada penelitian ini terkait dengan Kepentingan Pemerintah Kota Padang Dalam Menjalinkan Kerja Sama *Sister City* Dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau (Vietnam), Kerja sama *sister city* Kota Padang dengan Provinsi Ba Ria-Vung Tau di Vietnam ini merupakan bentuk jenis fenomena *Global Paradiplomacy*, dimana kerja sama *sister city* ini menunjukkan hubungan antara pemerintah daerah lintas negara yang ada di belahan dunia namun tidak saling berbatasan. Sub-negara dalam fenomena paradiplomasi ini memiliki kepentingan untuk mencapai keperluan dan kebutuhannya secara spesifik yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah pusat. Kemudian kerja sama *sister city* ini termasuk kedalam jenis *micro-regional paradiplomacy* sebab menyangkut isu politik level rendah, dimana pada praktiknya kerja sama *sister*

¹⁵ Agra Sena Pranajaya, *kerja sama sister city kota Padang dengan Provinsi Vung Tau*, (Naskah Publikasi, 2017), hal 58.

¹⁶ M. Fariz Akbar Fadillah, *Hasil wawancara Penulis dengan Pemerintah Kota Padang*

city Padang dan Ba Ria-Vung Tau ini termasuk kedalam kategori *multi-purpose paradiplomacy* yang mempunyai tujuan yang beragam untuk mengakomodir kepentingan dalam satu kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mukti, Takdir. 2013. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Sistercities.org, *What is a sister city*. <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/> (diakses pada 24 Mei 2023).
- Departemen Luar Negeri. 2006. *Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*, ed revisi, Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah*.
- Padang.go.id. *Gambaran Umum Kota Padang*, Januari 2016, <https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang> (diakses 03 Desember 2023)
- ITTPA. *Ba Ria-Vung Tau overview*. April 2022. <https://en-ittpa.baria-vungtau.gov.vn/article?item=3580f48cbf593a87f386598f7c662ec6> (diakses pada 03 Desember 2023)
- Mukti, T. A., Fathun, L. M., Muhammad, A., Sinambela, S. I., & Riyanto, S. 2021. "Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9 No.2. Diakses Pada 17 Desember 2023.
- Morgan, Patrick. 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?* New Brunswick Transaction. (dikutip di Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES)
- BPS Kota Padang. 2013. *Statistik Daerah Kota Padang 2013*, BPS Kota Padang, No. 11020001.1371
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Padang. 2019. *Catatan KSSC Padang BRTV*. Power Point.
- Dinas Pertanian Kota Padang. 2018. *Laporan Kegiatan Magang Petani, PPL, dan Petugas/Pendamping*. Laporan Kegiatan
- M. Fariz Akbar Fadillah. *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pemerintah Kota Padang*. Padang, 2024.
- Pranajaya, Agra Sena. 2017. "kerja sama sister city kota Padang dengan kota Vung Tau". *Naskah Publikasi*. Diakses pada 26 Mei 2023.